BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

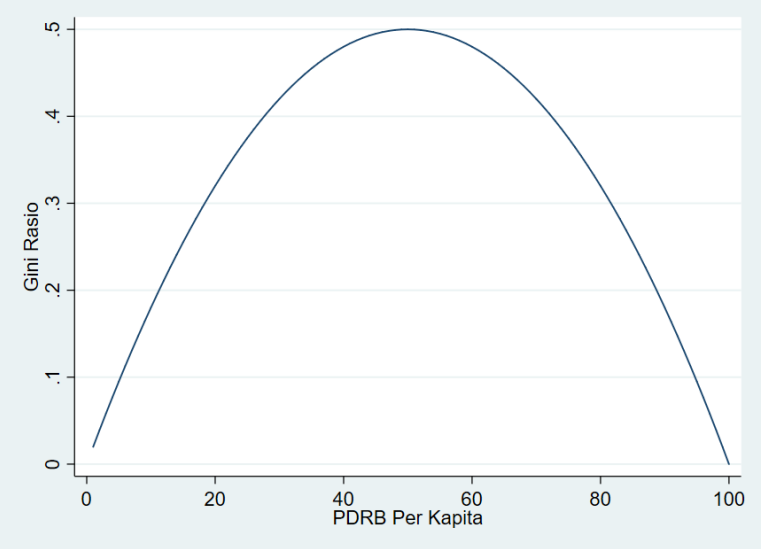
Pada bab ini berisi mengenai teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan ketimpangan pendapatan.

2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan digunakan sebagai ukuran yang mencerminkan kondisi seluruh populasi, tidak hanya terbatas pada rumah tangga miskin (Wibowo Tri, 2016). Menurut Haughton (2009), Salah satu cara paling sederhana untuk mengukur ketimpangan adalah dengan mengurutkan populasi dari kelompok dengan tingkat pengeluaran atau pendapatan terendah hingga tertinggi. Selanjutnya, populasi tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok, misalnya lima kelompok (kuintil) atau sepuluh kelompok, kemudian dihitung persentase kontribusi masing-masing kelompok terhadap total pengeluaran. Dalam pembagian lima kelompok (kuintil), umumnya kelompok dengan tingkat pengeluaran terendah hanya menyumbang sekitar 6 sampai 10 persen dari total pengeluaran, sedangkan kelompok dengan tingkat pengeluaran tertinggi dapat mencapai sekitar 35 sampai 50 persen.

Salah satu teori klasik yang menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan dikemukakan oleh Simon Kuznets melalui hipotesis *inverted U-curve*. Kuznets, (1995) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Perbedaan produktivitas dan tingkat upah

antar sektor menyebabkan kelompok masyarakat tertentu memperoleh peningkatan pendapatan lebih cepat dibandingkan kelompok lainnya. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan berpotensi menurun. Hal ini terjadi karena meluasnya akses terhadap pendidikan, peningkatan mobilitas tenaga kerja, serta berkembangnya institusi dan kebijakan ekonomi yang mendukung pemerataan. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan menurut Kuznets dipandang sebagai fenomena sementara dalam proses pembangunan, meskipun pola tersebut tidak bersifat universal dan sangat bergantung pada konteks institusional masing-masing negara.



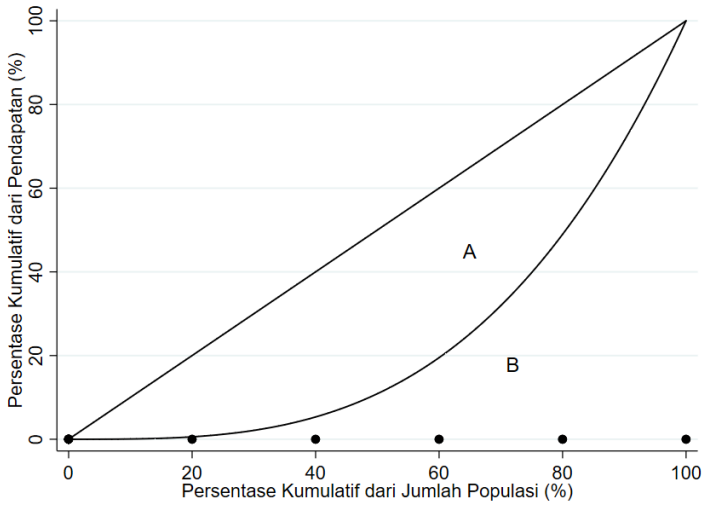
Sumber: Gambar diolah, Kuznet (1955)

Gambar 2. 1. Hipotesis U terbalik Kuznet

Setelah memahami ketimpangan pendapatan sebagai fenomena yang dapat berubah seiring dengan proses pembangunan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Kuznets, maka diperlukan suatu pendekatan yang mampu menggambarkan serta mengukur tingkat ketimpangan tersebut secara empiris.

Pengukuran ini penting untuk mengetahui sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat terjadi secara merata atau justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi untuk menggambarkan distribusi pendapatan adalah Kurva Lorenz.

Kurva Lorenz diperkenalkan oleh Lorenz (1905) sebagai alat grafis untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Kurva ini menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif populasi yang diurutkan dari kelompok termiskin hingga terkaya dengan persentase kumulatif pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki. Apabila distribusi pendapatan bersifat sempurna merata, maka kurva akan membentuk garis diagonal yang dikenal sebagai garis kesetaraan sempurna. Sebaliknya, apabila distribusi pendapatan tidak merata, kurva Lorenz akan melengkung menjauhi garis kesetaraan tersebut. Semakin besar jarak antara kurva Lorenz dengan garis kesetaraan, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat.



Sumber: Gambar diolah, Lorenz (1902)

Gambar 2. 2. Kurva Lorenz

2.1.2 Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, peluang kerja, dan partisipasi dalam pembangunan (OSAGI, 2001). UNDP mengukur tingkat kesetaraan gender melalui dua indikator utama, yaitu *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Inequality Index* (GII). GDI mencerminkan perbandingan pencapaian manusia antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sedangkan GII mengukur kehilangan potensi pembangunan akibat ketimpangan gender.

Berdasarkan Amartya Sen (1999) dalam pendekatan *capability approach*, kesetaraan gender bukan hanya terkait kesamaan hasil ekonomi, tetapi juga kebebasan individu untuk mengembangkan kemampuan dan menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, ketimpangan gender dapat menurunkan potensi ekonomi karena membatasi partisipasi perempuan dalam aktivitas produktif. Konsep kesetaraan gender pada intinya tidak dapat dilepaskan dari perluasan kemampuan perempuan dalam membuat pilihan (pemberdayaan). Konsep kesetaraan gender pada intinya tidak dapat dilepaskan dari gagasan tentang pemberdayaan, yakni proses perluasan kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan-pilihan strategis dalam hidupnya, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami keterbatasan dari kebebasan memilih.

Menurut Naila Kabeer (1999), kemampuan memilih ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan dibentuk oleh interaksi tiga dimensi yang

saling berkaitan: sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan pencapaian (*achievements*). Dalam konteks pembangunan ekonomi makro, kerangka sosiologis yang mendalam tersebut diadopsi dan dioperasionalkan secara lebih terukur oleh *World Bank.* Kesetaraan gender diformulasikan melalui tiga ranah utama yang sangat sejalan dengan logika Kabeer. Pertama adalah akumulasi modal dasar (*endowments*), seperti kesehatan, rata-rata lama sekolah, dan aset fisik, yang secara konsep sejalan dengan dimensi sumber daya Kabeer. Kedua adalah peluang ekonomi (*economic opportunities*), yakni tentang bagaimana modal dasar tersebut digunakan secara setara di pasar kerja agar perempuan mampu berpartisipasi dalam aktivitas produktif dan mendapatkan distribusi pendapatan yang adil. Ketiga adalah penerapan agensi (*agency*), yang diukur melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan tata kelola politik, serta kendali atas keputusan strategis di tingkat rumah tangga (The world bank, 2012).

2.2 Studi Terkait

Penelitian terdahulu oleh Baloch et al., (2018) menggunakan pendekatan data panel dinamis untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap ketimpangan pendapatan di 103 negara, baik maju maupun berkembang, selama periode 2006 hingga 2013. Dengan metode *System Generalized Method of Moments* (Sys-GMM), penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kesetaraan gender secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan melalui empat dimensi, yaitu akses pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik. Hasil tersebut menegaskan bahwa integrasi isu gender

berperan penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata terutama di negara berkembang.

Penelitian lain yang relevan adalah Abdul et al., (2024) yang menganalisis pengaruh kebijakan upah minimum terhadap ketimpangan gender di 34 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan panel dinamis dengan Arellano-Bond GMM dan *System* GMM. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan upah minimum memiliki hubungan yang kompleks dengan ketimpangan gender, di mana beberapa indikator pemberdayaan perempuan justru bergerak berlawanan arah dengan ekspektasi. Studi ini memperkuat pentingnya menggunakan metode panel dinamis untuk menangkap efek jangka pendek dan jangka panjang dalam isu ketimpangan berbasis gender, meskipun fokus variabel dan konteks geografisnya berbeda dari penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian oleh Naeem dan Khan (2021) menyoroti hubungan antara desentralisasi fiskal dan kesetaraan gender di 29 negara berkembang dengan menggunakan pendekatan *System-GMM*. Studi ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesetaraan gender, namun efek tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi dan karakteristik kelompok pendapatan negara. Interaksi antara desentralisasi fiskal dan *control of corruption* terbukti meningkatkan kesetaraan gender secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan institusi dan tata kelola berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan gender mampu memberikan dampak pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor pendidikan serta aspek institusional seperti partisipasi perempuan dalam politik dan kualitas demokrasi memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Studi oleh Baloch et al., (2018) menunjukkan bahwa kesetaraan gender, termasuk keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan kualitas demokrasi, berperan dalam memengaruhi distribusi pendapatan melalui mekanisme kebijakan yang lebih inklusif. Sementara itu, penelitian oleh Hindun et al., (2019) menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, di mana peningkatan pendidikan berkontribusi terhadap perbaikan distribusi pendapatan meskipun masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel kontrol berupa rata-rata lama sekolah perempuan, proporsi perempuan di parlemen, serta indeks demokrasi untuk melihat peran faktor pendidikan dan institusional dalam memengaruhi distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan.